Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Laporan Pengendalian dan Evaluasi

Renja TW IV 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel Air Itam – Pangkalpinang Telp. (0717) 439369; Fax (0717) 439371

http://kesbangpol.babelprov.go.id/

@2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka laporan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga perlu dilakukan evaluasi pertriwulan tahun anggaran.

Semoga laporan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sehingga dapat meningkatan kualitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang.

Pangkalpinang, Januari 2025

Plt. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO KURNIAWAN, S. Sos.,M,.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19700926 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Sasaran Strategis 2

D. Program dan Kegiatan 3

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA 9

A. Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah 9

B. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Renja Perangkat Daerah 13

BAB III KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT 30

A. Kendala 30

B. Saran Tindak Lanjut 30

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 31

A. Kesimpulan 31

B. Saran 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Jangka Menengah setelah perubahan Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3

Tabel 1.2. Rincian Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kep. Babel Tahun Anggaran 2024 4

Tabel 1.3. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 4

Tabel 2.1 Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 9

Tabel 2.2 Interval Nilai Realisasi Kinerja dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 14

Tabel 2.3 Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III Tahun 2024 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintah yang memegang peranan di dalam sistem pemerintahan Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta orientasi pada hasil.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan tiap tahun anggaran. Untuk mengetahui tingkat kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga perlu dilakukan evaluasi pertriwulan tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan maksud untuk melaksanakan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sebagai bahan penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun selanjutnya. Adapun tujuan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran.
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi;
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya

C. Sasaran Strategis

Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat;

b. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah.

Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023-2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penguatan Kehidupan yang berdemokratis berdasarkan pancasila	persentase peristiwa konflik Sosial menurun setiap tahunnya	75%	50%	25%	25%
2.	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah	**Nilai RB perangkat Daerah**	66%	68%	70%	72%

D. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 72.065.263.764,- yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 04 Januari 2024.

Secara Keseluruhan jumlah anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2024 dan rinciannya dapat dilihat pada table 1.2. dibawah ini :

Tabel 1.2.

Rincian Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.	**Belanja Operasional**	**71.157.727.664**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.855.618.124
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.392.419.580
5.1.05	Belanja Hibah	57.589.289.960
5.2	**Belanja Modal**	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	907.536.100
Jumlah Belanja		**72.065.263.764**

Anggaran tahun 2024 diatas untuk membiayai 6 (enam) program, Tiga Belas (13) kegiatan dan empat puluh enam (46) Sub Kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.3.

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Survey Kepuasan Pelayanan Internal**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Indeks pelayanan adminitrasi barang milik daerah**
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian**
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Indeks Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan
5.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Hitung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
6.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Indeks Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Jumlah Konflik yg berlatarbelakang Ideologi**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi dan wawasan kebangsaan**
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
1.3	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
III	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN**	**persentase pembinaan politik di daerah**

	ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik**
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Indek Kinerja Ormas**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
1.1	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1.2	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di daerah**

1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**persentase Daerah terlibat Konflik Sosial**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

A. Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten.

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pengaggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran. Perbandingan antara program kegiatan dalam Renja 2024 dan Renstra 2023 - 2026 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan antara Program/Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah
dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM RENJA TAHUN 2024	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM RENSTRA TAHUN 2023-2026	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Sesuai**

1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Sesuai**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sesuai
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sesuai
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sesuai
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Sesuai**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sesuai
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sesuai
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sesuai
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sesuai
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sesuai
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Sesuai**
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sesuai
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Sesuai**
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sesuai
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sesuai
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Sesuai**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sesuai
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sesuai
5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sesuai
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai
5.5	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Sesuai
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sesuai
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sesuai
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sesuai**
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sesuai
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesuai
6.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sesuai

7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sesuai**
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sesuai
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sesuai
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sesuai
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sesuai**
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sesuai
8.2	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Sesuai
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sesuai
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sesuai
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Sesuai**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Sesuai**
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Sesuai
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Sesuai
1.3	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Sesuai
III	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Sesuai**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Sesuai**
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Sesuai

	Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sesuai
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sesuai
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Sesuai**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Sesuai**
1.1	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sesuai
1.2	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sesuai
1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah	Sesuai
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Sesuai**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Sesuai**
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah	Sesuai

1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan FasilitasiPencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaandi Daerah	Sesuai
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sesuai
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Sesuai**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Sesuai**
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sesuai
1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sesuai
1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sesuai
1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sesuai
1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sesuai

1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Sesuai

B. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Renja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja pada Triwulan IV memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan triwulan pertama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai sebagai berikut:

Tabel 2.2
Interval Nilai Realisasi Kinerja dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV									
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan OPD (%)	65,00	44.447.535.498	79,00	-	81	8.568.061.087		2.323.570.152		2.097.277.239		1.923.482.912		1.446.381.640	81	7.790.711.943	100,00%	90,93%	80,00	7.790.711.943		17,53%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	8,00	2.086.812.253	0,00	-	7	146.703.100	2	90.614.190	2	14.976.126	2	18.219.340	1	13.150.000	7	136.959.656	100,00%	93,36%	0,00	136.959.656	0,00%	31,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1.489.709.736	0,00	-	2	106.493.800	-	74.860.920	1	9.110.926	1	10.081.900	-	3.280.000	2	97.333.746	100,00%	91,40%	2,00	97.333.746	0,00%	6,53%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		89.993.510	0,00	-	12	18.305.000	3	7.937.100	3	1.000.600	3	4.283.900	3	5.000.000	12	18.221.600	100,00%	99,54%	12,00	18.221.600	0,00%	20,25%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		507.109.007	0,00	-	2	21.904.300	-	7.816.170	1	4.864.600	1	3.853.540	-	4.870.000	2	21.404.310	100,00%	97,72%	2,00	21.404.310	0,00%	4,22%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		31.796.338.760	0,00	-	80	6.212.885.847	20	1.994.610.510	20	1.154.632.089	20	1.588.897.763	20	874.173.672	80	5.612.314.034	100,00%	90,33%	0,00	5.612.314.034	0,00%	207,08%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		31.421.378.760	0,00	-	36	6.087.889.147	36	1.979.650.373	36	1.127.971.839	36	1.586.947.763	36	816.064.264	36	5.510.634.239	100,00%	90,52%	36,00	5.510.634.239	0,00%	17,54%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		53.280.000	0,00	-	12	1.998.000	3	-	3	1.602.750	3	-	3	-	12	1.602.750	100,00%	80,22%	12,00	1.602.750	0,00%	3,01%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		53.280.000	0,00	-	2000	7.999.700	500	-	500	6.265.050	500	1.250.000	500	-	2.000	7.515.050	100,00%	93,94%	2000,00	7.515.050	0,00%	14,10%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		53.680.000	0,00	-	12	29.999.800	3	3.870.000	3	5.338.600	3	-	3	-	12	9.208.600	100,00%	30,70%	12,00	9.208.600	0,00%	17,15%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		53.680.000	0,00	-	13	54.999.900	3	-	3	4.000.000	3	-	4	50.683.008	13	54.683.008	100,00%	99,42%	13,00	54.683.008	0,00%	101,87%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		53.680.000	0,00	-	10	11.999.900	1	3.860.137	3	120.000	3	-	3	7.003.600	10	10.983.737	100,00%	91,53%	10,00	10.983.737	0,00%	20,46%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		53.680.000	0,00	-	13	7.999.600	3	6.000.000	3	1.915.050	3	-	4	-	13	7.915.050	100,00%	98,94%	13,00	7.915.050	0,00%	14,74%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		53.680.000	0,00	-	2	9.999.800	-	1.230.000	1	7.418.800	1	700.000	-	422.800	2	9.771.600	100,00%	97,72%	2,00	9.771.600	0,00%	18,20%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks pelayanan adminitrasi barang milik daerah (%)	77,16	214.720.000	0,00	-	77,7	72.012.400	-	6.859.370	-	11.620.858	78	1.230.000	-	34.697.930	78	54.408.158	100,00%	75,55%	0,00	54.408.158	0,00%	101,36%

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		53.680.000	0,00	-	1	9.812.400	-	-	1	4.000.000	-	-	-	5.149.000	1	9.149.000	100,00%	93,24%	1,00	9.149.000	0,00%	17,04%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		53.680.000	0,00	-	2	7.750.000	-	-	1	5.307.858	1	-	-	1.750.000	2	7.057.858	100,00%	91,07%	2,00	7.057.858	0,00%	13,15%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		53.680.000	0,00	-	2	9.750.000	-	-	1	-	1	-	-	2.000.000	2	2.000.000	100,00%	20,51%	2,00	2.000.000	0,00%	3,73%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		53.680.000	0,00	-	2	44.700.000	-	6.859.370	-	2.313.000	1	1.230.000	1	25.798.930	2	36.201.300	100,00%	80,99%	2,00	36.201.300	0,00%	67,44%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah (0.83)		3.169.903.281	0,00	-	83	422.205.400	20	36.335.867	20	106.585.206	20	75.283.100	23	150.095.050	83	368.299.223	100,00%	87,23%	0,00	368.299.223	0,00%	179,41%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		53.719.047	0,00	-	1	56.989.800	-	-	-	3.221.000	1	6.430.000	-	46.875.000	1	56.526.000	100,00%	99,19%	1,00	56.526.000	0,00%	105,23%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		108.880.818	0,00	-	2	25.861.400	-	4.631.000	1	5.579.000	1	5.719.000	-	9.652.000	2	25.581.000	100,00%	98,92%	2,00	25.581.000	0,00%	23,49%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		311.540.742	0,00	-	1	36.948.300	-	5.877.000	-	10.209.350	1	5.565.600	-	13.140.900	1	34.792.850	100,00%	94,17%	1,00	34.792.850	0,00%	11,17%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		196.307.760	0,00	-	1	36.000.000	-	-	-	17.330.000	1	10.080.000	-	-	1	27.410.000	100,00%	76,14%	1,00	27.410.000	0,00%	13,96%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		636.544.194	0,00	-	6	115.055.900	-	7.088.000	2	26.966.900	2	31.818.500	2	34.577.750	6	100.451.150	100,00%	87,31%	6,00	100.451.150	0,00%	15,78%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		214.720.000	0,00	-	1	12.350.000	-	3.632.500	-	-	1	1.250.000	-	750.000	1	5.632.500	100,00%	45,61%	1,00	5.632.500	0,00%	2,62%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.648.190.720	0,00	-	2	139.000.000	-	15.107.367	1	43.278.956	1	14.420.000	-	45.099.400	2	117.905.723	100,00%	84,82%	2,00	117.905.723	0,00%	7,15%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan (Jumlah)	15,00	1.727.000.000	0,00	-	96	637.646.400	-	-	30	592.300.000	66	-	-	14.000.000	96	606.300.000	100,00%	95,08%	0,00	606.300.000	0,00%	35,11%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1.727.000.000	0,00	-	196	637.646.400	-	-	-	592.300.000	-	-	196	14.000.000	196	606.300.000	100,00%	95,08%	196,00	606.300.000	0,00%	35,11%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (85 undefined)	82,50	4.422.964.084	0,00	-	85	822.897.940	-	180.700.215	-	191.962.960	-	184.506.709	85	239.527.113	85	796.696.997	100,00%	96,82%	0,00	796.696.997	0,00%	33,88%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		5.644.452	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		774.594.832	0,00	-	12	144.297.940	3	24.100.215	3	35.362.960	3	27.906.709	3	30.727.113	12	118.096.997	100,00%	81,84%	12,00	118.096.997	0,00%	15,25%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		3.642.724.800	0,00	-	18	678.600.000	4	156.600.000	5	156.600.000	5	156.600.000	4	208.800.000	18	678.600.000	100,00%	100,00%	18,00	678.600.000	0,00%	18,63%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (80 undefined)	79,00	1.029.797.120	0,00	-	80	253.710.000	20	14.450.000	20	25.200.000	20	55.346.000	20	120.737.875	80	215.733.875	100,00%	85,03%	0,00	215.733.875	0,00%	32,12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		519.837.120	0,00	-	5	137.762.000	1	14.450.000	2	14.400.000	1	29.216.000	1	53.040.875	5	111.106.875	100,00%	80,65%	5,00	111.106.875	0,00%	21,37%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		509.960.000	0,00	-	196	65.948.000	50	-	50	10.800.000	50	26.130.000	50	17.870.000	200	54.800.000	100,00%	83,10%	200,00	54.800.000	0,00%	10,75%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1	49.827.000	1	49.827.000	100,00%	99,65%	1,00	49.827.000	0,00%	0,00%
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	90,93%				
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																							
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Jumlah konflik yang berlatarbelakang Ideologi (Orang)	0,00	1.610.400.000	75,00	-	75	2.903.638.640		37.279.991		320.997.300		796.931.363		1.466.532.355	75	2.621.741.009	100,00%	90,29%	50,00	2.621.741.009		162,80%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Jumlah Konflik yg berlatarbelakang Ideologi (0.5)		1.610.400.000	0,00	-	5	2.903.638.640	-	37.279.991	2	320.997.300	3	796.931.363	-	1.466.532.355	5	2.621.741.009	100,00%	90,29%	0,00	2.621.741.009	0,00%	2,53%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		-	0,00	-	1000	2.827.138.640	300	12.825.366	300	313.857.300	300	778.907.243	100	1.442.467.155	1.000	2.548.057.064	100,00%	90,13%	1000,00	2.548.057.064	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		-	0,00	-	150	34.000.000	30	21.454.625	30	1.640.000	30	-	60	9.840.000	150	32.934.625	100,00%	96,87%	150,00	32.934.625	0,00%	0,00%

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	*Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)		1.610.400.000	0,00	-	1	42.500.000	-	3.000.000	-	5.500.000	1	18.024.120	-	14.225.200	1	40.749.320	100,00%	95,88%	1,00	40.749.320	0,00%	2,53%
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	90,29%				
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan politik di daerah (Persentase)	24,00	298.661.753.200	30,00	-	30	57.868.809.860		75.339.240		56.398.029.570		48.142.464		1.213.570.700	30	57.735.081.974	100,00%	99,77%	30,00	57.735.081.974		19,33%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	persentase pembinaan politik di daerah (0.3)		298.661.753.200	0,00	-	3	57.868.809.860	-	75.339.240	1	56.398.029.570	1	48.142.464	1	1.213.570.700	3	57.735.081.974	100,00%	99,77%	0,00	57.735.081.974	0,00%	27,65%

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		295.582.400.000	0,00	-	35	57.693.716.360	10	57.039.240	10	56.367.217.460	10	25.416.600	5	1.157.356.500	35	57.607.029.800	100,00%	99,85%	35,00	57.607.029.800	0,00%	19,49%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		1.948.718.200	0,00	-	280	131.111.000	25	15.840.000	75	12.776.330	100	3.230.200	80	53.500.000	280	85.346.530	100,00%	65,09%	280,00	85.346.530	0,00%	4,38%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)		1.130.635.000	0,00	-	1	43.982.500	-	2.460.000	-	18.035.780	1	19.495.664	-	2.714.200	1	42.705.644	100,00%	97,10%	1,00	42.705.644	0,00%	3,78%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,77%				
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	49,00	3.220.800.000	50,00	-	60	169.753.400		7.740.000		26.920.000		46.952.200		62.968.637	50	144.580.837	83,33%	85,17%	55,00	144.580.837		4,49%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)		3.220.800.000	0,00	-	55	169.753.400	10	7.740.000	10	26.920.000	15	46.952.200	20	62.968.637	55	144.580.837	100,00%	85,17%	0,00	144.580.837	0,00%	10,91%
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		1.610.400.000	0,00	-	250	135.967.200	25	2.460.000	50	24.460.000	75	42.541.200	100	44.500.837	250	113.962.037	100,00%	83,82%	250,00	113.962.037	0,00%	7,08%
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)		1.342.000.000	0,00	-	250	27.394.400	25	3.280.000	50	2.460.000	75	2.426.000	100	17.247.100	250	25.413.100	100,00%	92,77%	250,00	25.413.100	0,00%	1,89%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		268.400.000	0,00	-	1	6.391.800	-	2.000.000	-	-	1	1.985.000	-	1.220.700	1	5.205.700	100,00%	81,44%	1,00	5.205.700	0,00%	1,94%
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	85,17%				
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi				

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah (Persentase)	90,00	25.061.525.334	30,00	-	20	583.578.000		18.560.000		278.808.800		74.960.000		167.334.920	30	539.663.720	150,00%	92,47%	30,00	539.663.720		2,15%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah (0.3)		25.061.525.334	0,00	-	3	583.578.000	-	18.560.000	1	278.808.800	1	74.960.000	1	167.334.920	3	539.663.720	100,00%	92,47%	0,00	539.663.720	0,00%	5,76%
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		22.430.358.800	0,00	-	1000	536.589.100	20	15.690.000	80	269.378.800	500	56.100.000	400	153.633.720	1.000	494.802.520	100,00%	92,21%	1000,00	494.802.520	0,00%	2,21%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		1.719.277.534	0,00	-	250	27.989.300	20	2.870.000	50	9.430.000	80	3.280.000	100	10.944.000	250	26.524.000	100,00%	94,76%	250,00	26.524.000	0,00%	1,54%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)		911.889.000	0,00	-	3	18.999.600	-	-	1	-	1	15.580.000	1	2.757.200	3	18.337.200	100,00%	96,51%	3,00	18.337.200	0,00%	2,01%
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00%	92,47%				
																Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah terlibat Konflik Sosial (Persentase)	0,00	9.625.000.211	75,00	-	75	616.286.800		33.260.000		178.431.270		119.606.700		174.331.840	75	505.629.810	100,00%	82,04%	50,00	505.629.810		5,25%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Daerah terlibat Konflik Sosial (0.5)		9.625.000.211	0,00	-	5	616.286.800	1	33.260.000	1	178.431.270	2	119.606.700	1	174.331.840	5	505.629.810	100,00%	82,04%	0,00	505.629.810	0,00%	35,23%
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		-	0,00	-	1	16.949.700	-	1.640.000	-	4.690.000	1	5.861.000	-	2.820.000	1	15.011.000	100,00%	88,56%	1,00	15.011.000	0,00%	0,00%
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		53.680.000	0,00	-	1	16.999.800	-	1.230.000	-	2.460.000	1	6.428.000	-	3.730.000	1	13.848.000	100,00%	81,46%	1,00	13.848.000	0,00%	25,80%

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		2.857.964.727	0,00	-	350	114.057.100	20	18.090.000	50	28.333.250	100	6.367.700	180	37.143.685	350	89.934.635	100,00%	78,85%	350,00	89.934.635	0,00%	3,15%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		4.791.827.782	0,00	-	76	223.150.000	12	12.300.000	20	52.989.650	40	20.960.000	4	91.151.005	76	177.400.655	100,00%	79,50%	76,00	177.400.655	0,00%	3,70%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)		1.921.527.702	0,00	-	7	52.908.300	-	-	3	-	4	11.890.000	-	37.743.150	7	49.633.150	100,00%	93,81%	7,00	49.633.150	0,00%	2,58%

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)		-	0,00	-	1	192.221.900	-	-	-	89.958.370	1	68.100.000	-	1.744.000	1	159.802.370	100,00%	83,13%	1,00	159.802.370	0,00%	0,00%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										**100,00%**	**82,04%**				
								Predikat Kinerja										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				
						70.710.127.787		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**100,00%**	**98,06%**				
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				

Berdasarkan Tabel 2.3. diatas, Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 diatas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 8 kegiatan dengan 29 sub kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.568.061.087,-. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tingkat serapan anggaran program ini sebesar Rp 7.790.711.943,- dengan capaian kinerja sebesar 90,93% dan tergolong dalam predikat kinerja "Tinggi"

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

   Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.903.638.640,-. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tingkat serapan anggaran program ini sebesar Rp. 2.621.741.009,- dengan capaian kinerja sebesar 90,29% dan tergolong dalam predikat kinerja "Tinggi"

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

   Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.868.809.860,-. Pada Triwulan IV Tahun 2024 tingkat serapan anggaran program ini sebesar Rp. 57.735.081.974,- dengan capaian kinerja sebesar 99,77% dan tergolong dalam predikat kinerja "Sangat Tinggi".

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

   Pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun anggaran 2024 terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp. 169.753.400,- . Pada Triwulan IV Tahun 2024 tingkat serapan anggaran program ini sebesar Rp. 144.580.837,- dengan capaian kinerja sebesar 85,17% dan tergolong dalam predikat kinerja "Tinggi".

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

   Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun anggaran 2024 terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp. 583.578.000,-. Pada Triwulan IV Tahun 2024 tingkat serapan anggaran program ini sebesar Rp. 539.663.720,- dengan capaian kinerja sebesar 92,47% dan tergolong dalam predikat kinerja "Sangat Tinggi".

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

   Pada Program Peningkatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun angggaran 2024 terdiri dari 1 kegiatan dengan 6 sub kegiatan dan jumlah anggaran sebesar 616.286.800,-. Pada Triwulan IV Tahun 2024 tingkat serapan anggaran program ini sebesar Rp. 505.629.810,- dengan capaian kinerja sebesar 82,04% dan tergolong dalam predikat kinerja "Sangat Tinggi".

Pada Triwulan IV Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai target rencana penyerapan anggaran sebesar 98,06% dan tergolong dalam predikat kinerja "Sangat Tinggi".

BAB III
KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

A. Kendala

Berdasarkan Evaluasi Renja, hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sudah berjalan dengan maksimal dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan IV Tahun 2024. total capaian kinerja triwulan IV sebesar 98,06% dan tergolong dalam kategori "Sangat Tinggi",.

B. Saran Tindak Lanjut

Saran tindak lanjut untuk menghadapi kendala pada Triwulan IV Tahun 2024 agar dapat diatasi dan pelaksanaan program/kegiatan tidak terhambat, dapat dilakukan dengan menjalankan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia, koordinasi dan konsultasi secara berkala baik internal maupun eksternal terkait upaya percepatan dalam mencapai target kinerja dan anggaran pada tahun anggaran 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang maksimal;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketersediaan anggaran agar realisasi kinerja program/kegiatan bisa tercapai sesuai dengan target kinerja;
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik agar capaian kinerja dan anggaran dapat maksimal.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari pengendalian dan evaluasi Triwulan IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 mencakup 6 (enam) program, Tiga Belas (13) kegiatan dan empat puluh enam (46) Sub Kegiatan.
2. Total capaian realisasi kinerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 98,06% dan tergolong dalam kategori "Sangat Tinggi" (ST);

B. Saran

Sebagai upaya perbaikan pencapaian target kinerja pada Tahun berikutnya maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi secara berkala baik internal maupun eksternal terkait upaya percepatan dalam mencapai target kinerja dan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang maksimal;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan target kinerja agar realisasi fisik/kinerja dan anggaran kegiatan dapat tercapai sesuai rencana kerja; dan
3. Meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan secara optimal dengan ketersediaan anggaran yang tersedia.

Demikian evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun untuk mendapat gambaran capaian kinerja secara akuntabel. Selanjutnya evaluasi hasil renja akan djadikan sebagai bahan penyusunan dan kebijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah

tahun berikutnya dan bahan masukan perubahan Renstra Perangkat Daerah, guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan. Atas segala bentuk masukan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Januari 2025

Plt. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO KURNIAWAN, S. Sos.,M,.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19700926 199703 1 007